

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER DAN TANTANGANNYA

Nuruddin^{*1}, M. Asif Nur Fauzi², Chulil Barory³

¹STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri, Pasuruan, Indonesia nuruddin.nrd1@gmail.com

²STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri, Pasuruan, Indonesia nurfauziasif@gmail.com

³STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri, Pasuruan, Indonesia barorychulil@gmail.com

^{*}Corresponding author; E-mail addresses: nuruddin.nrd1@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the high number of acts of corruption in Indonesia currently and it is deemed necessary to implement anti-corruption education in schools as a preventive measure from an early age. Anti-corruption education in schools is a strategic effort to shape students' character with integrity and responsibility. This educational concept not only emphasizes understanding corruption as a social problem, but also on developing strong moral values in forming honest and transparent attitudes and behavior. This research uses a qualitative descriptive method with interview, observation and documentation data collection methods. The data analysis used was through data triangulation and continued with drawing conclusions. This research explores the concept of character education in the context of anti-corruption education and the challenges faced in its implementation in the educational environment. These challenges include limited resources, lack of understanding and awareness of the importance of anti-corruption education, as well as resistance to cultural change that supports integrity. To overcome these challenges, this research suggests a collaborative approach between schools, anti-corruption institutions and communities to increase understanding and commitment towards anti-corruption education. Proposed strategies include developing inclusive curricula, ongoing training for teachers, and building a school culture that encourages honesty and accountability.

Keywords: *Anti-Corruption Education, Character Education, Challenges*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka tindak korupsi di Indonesia saat ini dan dianggap perlu untuk menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah sebagai langkah preventif sejak dini. Pendidikan anti korupsi di sekolah merupakan upaya strategis untuk membentuk karakter siswa yang berintegritas dan bertanggung jawab. Konsep pendidikan ini tidak hanya menekankan pada pemahaman tentang korupsi sebagai masalah sosial, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai moral yang kuat dalam membentuk sikap dan perilaku yang jujur serta transparan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah melalui triangulasi data dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menjelajahi konsep pendidikan karakter dalam konteks pendidikan anti korupsi dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di lingkungan pendidikan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan anti korupsi, serta resistensi terhadap perubahan budaya yang mendukung integritas. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini menyarankan pendekatan kolaboratif antara sekolah, lembaga anti korupsi, dan komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap pendidikan anti korupsi. Strategi yang diajukan termasuk pengembangan kurikulum yang inklusif, pelatihan yang berkelanjutan bagi guru, dan membangun budaya sekolah yang mendorong kejujuran dan akuntabilitas.

Kata kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Karakter, Tantangan

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi perhatian semua pihak pada saat ini. Bentuk-bentuk dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak daripada kemampuan untuk melukiskannya. Iklim yang diciptakan oleh korupsi menguntungkan bagi tumbuh suburnya berbagai kejahatan (Syed Hussain Alatas, 1987). Tindak korupsi di negeri ini bisa dikatakan mulai merajalela, bahkan menjadi kebiasaan, dan yang lebih memprihatinkan adalah korupsi dianggap biasa saja atau hal yang sepele. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi, namun tetap saja korupsi menjadi hal yang sering terjadi.

Memerangi korupsi bukan cuma menangkap koruptor. Sejarah mencatat, dari sejumlah kejadian terdahulu, sudah banyak usaha menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara. Era orde baru, yang berlalu, kerap membentuk lembaga pemberangus korupsi. Mulai Tim

Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, Komisi Empat pada tahun 1970, Komisi Anti Korupsi pada 1970, Opstib di tahun 1977, hingga Tim Pemberantas Korupsi. Nyatanya, penangkapan para koruptor tidak membuat jera yang lain. Koruptor junior terus bermunculan (Faisal Djabbar, 2014).

Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya lewat penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini adalah kesadaran setiap orang untuk taat pada undang-undang korupsi (La Sina, 2008). Bangsa Indonesia sekarang butuh penerus bangsa yang berakhlak mulia, dalam artian mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Kesadaran tersebut membuat pemerintah memutar otak untuk bagaimana menciptakan hal tersebut. Lebih khusus kepada penanaman nilai antikorupsi pada setiap individu putra bangsa. Namun masalahnya adalah Membentuk hal tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Menanggapi masalah tersebut beberapa kalangan elemen masyarakat mengungkapkan bahwa ada kekeliruan dalam upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah, karena fokusnya hanya kepada menindak para koruptor. Seperti apa yang dikatakan oleh M. Zaki: “di Indonesia, Pedagogi harapan tersebut, belum sepenuhnya masuk ke dalam lini pendidikan. Negara justru mensibukkan dirinya dengan mengotak-atik mahzab pidana mati dan perampasan aset diruang parlemen. Padahal esensi dari aktivitas pemberantasan korupsi adalah melakukan pencegahan agar tidak menimbulkan tindak pidana tersebut” (M. Reza S. 2012).

Upaya pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan (Lukman Hakim, 2012). Sedikit sekali upaya untuk pencegahan korupsi, salah satunya yaitu lewat pendidikan antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa. Sekolah dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan siswa (Suciptaningsih, 2014). Pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran dalam proses pembelajaran mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang antikorupsi.

Kekhasan pendidikan antikorupsi ialah dapat menghasilkan anak bangsa yang jujur boleh jadi Indonesia akan menjadi bangsa yang teregister sebagai Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik bangsa paling “bersih”. Diharapkan pemerintah dapat membangun kerja sama dengan berbagai pilar utama pendidikan yaitu: sekolah, orang tua, dan masyarakat serta pihak swasta dalam membangun karakter jujur dan membuat bangsa ini sehat secara mental dan moral (Manurung, 2012). Inti dari materi pendidikan antikorupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari sembilan nilai yang disebut dengan sembilan nilai antikorupsi. Sembilan nilai tersebut adalah: tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena pendidikan anti korupsi dari perspektif para pelaku pendidikan, yaitu guru, siswa, dan pembuat kebijakan. metode pengumpulan data yang digunakan diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan kepada responden dalam menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka terkait pendidikan anti korupsi. Pertanyaan wawancara mencakup topik seperti strategi pengajaran, materi pendidikan anti korupsi, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya (Moleong, 2013).

Peneliti mencatat interaksi antara guru dan siswa, metode pengajaran yang digunakan, serta respons siswa terhadap materi pendidikan anti korupsi. Observasi ini membantu untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang memerlukan perbaikan. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami bagaimana pendidikan anti korupsi diintegrasikan dalam kurikulum dan kebijakan sekolah. Dokumen-dokumen ini juga memberikan konteks tambahan untuk wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah melalui triangulasi data yaitu Peneliti membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner) untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Triangulasi ini juga membantu mengkonfirmasi temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pendidikan anti korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Anti Korupsi sebagai Konsep pendidikan Karakter

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini secara fundamental, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan. Pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari konsep pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam diri peserta didik sejak usia dini.

Nilai integritas bertujuan untuk mengedukasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral yang benar, baik ketika diawasi maupun tidak. Sedangkan nilai kejujuran lebih menekankan pentingnya berkata dan bertindak jujur dalam segala situasi. Nilai tanggung Jawab dapat mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain. Nilai keadilan bertujuan mengedukasi bahwa pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil dan setara (Purnama, 2023). Terakhir nilai kepedulian dengan menumbuhkan rasa peduli terhadap kesejahteraan orang lain dan lingkungan sekitar.

Menumbuhkan nilai-nilai (values) di atas tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa adanya peran guru dan manajemen sekolah yang terencana dan sistematis. Peran Guru dan Sekolah harus menjadi teladan dalam perilaku anti korupsi menunjukkan integritas dan kejujuran dalam tindakan sehari-hari. Selain itu, lingkungan Sekolah yang mampu menciptakan budaya sekolah yang transparan, akuntabel, dan adil, di mana praktik-praktik anti korupsi ditegakkan.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tindakan korupsi sejak dini menjadi suatu hal yang penting dalam karakter peserta didik di sekolah. Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk membentuk karakter individu melalui pengajaran dan pembiasaan nilai-nilai moral dan etika. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengetahuan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang positif. Pendidikan karakter bertujuan

untuk membangun individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki moral yang baik (Simanjuntak & Benuf, 2020).

Maka dari itu, pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter merupakan langkah strategis untuk membentuk generasi yang berintegritas dan anti korupsi. Melalui integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan kultur sekolah, serta pelatihan guru, pendidikan ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam membangun karakter peserta didik. Dengan upaya yang konsisten dan kolaboratif, pendidikan anti korupsi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Pendidikan karakter anti korupsi adalah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang kuat dalam diri peserta didik, dengan tujuan membentuk individu yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab (Komang & Cahyadi, 2022). Hal ini merupakan bagian penting dari pendidikan karakter yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian siswa sehingga mereka dapat mengenali, menghindari, dan menolak segala bentuk korupsi.

Beberapa implementasi pendidikan anti korupsi yang dapat dijadikan sebagai acuan standar sekolah mewujudkan peserta didik anti korupsi diantaranya :

1. **Penyusunan Kurikulum sekolah yang terintegrasi dengan pendidikan anti korupsi**
Integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah adalah langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pada peserta didik sejak dini. Dengan memasukkan materi anti korupsi ke dalam berbagai mata pelajaran dan aktivitas sekolah, siswa dapat memahami dan menginternalisasi pentingnya menolak segala bentuk korupsi. Ini bukan hanya tentang pengetahuan teoretis, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang kuat. Optimalisasi implementasi dari aspek kurikulum salah satunya melalui penyusunan modul pembelajaran khusus yang membahas konsep korupsi, dampaknya, dan cara pencegahannya. Modul ini dapat disesuaikan untuk berbagai jenjang pendidikan. Penggunaan model pembelajaran case study sebagai fasilitator materi tentang korupsi untuk menunjukkan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan ekonomi yang dapat diterapkan pada beberapa mata pelajaran seperti PPKN, Agama, dan Ekonomi (Taja & Aziz, 2016).
2. **Kegiatan Ekstrakurikuler yang mendukung perilaku anti korupsi**
Kegiatan ekstrakurikuler dan proyek memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan anti korupsi karena mereka memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam konteks yang praktis dan nyata. Melalui berbagai aktivitas ini, siswa tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang korupsi tetapi juga belajar bagaimana menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk membangun masyarakat yang lebih transparan dan adil. Dengan demikian, integrasi kegiatan ekstrakurikuler dan proyek dalam pendidikan anti korupsi adalah langkah strategis untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas tinggi. Kegiatan ekstrakurikuler dan proyek di sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anti korupsi. Aktivitas ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa tetapi juga memberikan kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan nyata (LAGHUNG, 2023). Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan yang menekankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, sekolah dapat membantu membentuk karakter yang kuat dan berkomitmen untuk menolak korupsi. Kegiatan ekstrakurikuler seperti debat, drama, dan simulasi membantu siswa mengembangkan integritas dan kejujuran. Misalnya, dalam

debat, siswa harus menyajikan argumen berdasarkan fakta dan etika. siswa belajar bertanggung jawab atas tugas dan peran mereka, serta memahami pentingnya akuntabilitas dalam setiap tindakan mereka. Implementasi pendidikan anti korupsi memiliki relevansi dalam menumbuhkan Kesadaran Sosial karena kegiatan yang berfokus pada isu korupsi, seperti seminar dan lokakarya, meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan ekonomi. selain itu, dapat berdampak pada pengembangan Pemahaman Praktis kepada peserta didik melalui Proyek yang melibatkan penelitian tentang kasus korupsi atau partisipasi dalam kampanye anti korupsi memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana korupsi terjadi dan cara mencegahnya.

3. Kantin Kejujuran

Implementasi pendidikan anti korupsi melalui program kantin kejujuran adalah strategi efektif untuk mengajarkan dan menginternalisasi nilai-nilai integritas dan kejujuran pada siswa. Program ini tidak hanya membentuk karakter individu tetapi juga menciptakan budaya kejujuran di lingkungan sekolah. Dengan dukungan dari guru, staf, dan orang tua, serta monitoring yang efektif, kantin kejujuran dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi siswa dan komunitas secara keseluruhan (Anam & Sakiyati, 2019). Kantin kejujuran adalah inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai integritas dan kejujuran di kalangan siswa. Dalam program ini, kantin sekolah dioperasikan dengan sistem kejujuran di mana siswa mengambil makanan atau minuman dan membayar tanpa pengawasan langsung. Program ini menjadi salah satu cara efektif untuk mengajarkan dan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dan Manfaat pendidikan anti korupsi melalui program kantin kejujuran diantaranya Pengembangan Nilai Integritas, Siswa belajar dan menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dan integritas, yang akan menjadi dasar perilaku mereka di masa depan. selain itu, Peningkatan Kesadaran Etis pada Siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya kejujuran dan dampak negatif dari tindakan koruptif.

4. Membangun Kultur atau budaya sekolah yang transparan

Membangun budaya sekolah yang transparan merupakan langkah penting dalam penerapan pendidikan anti korupsi. Melalui kepemimpinan yang berkomitmen, kebijakan yang jelas, pendidikan dan pelatihan, partisipasi siswa, penggunaan teknologi, serta pengawasan yang efektif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan akuntabilitas. Ini tidak hanya membentuk karakter siswa yang kuat dan beretika tetapi juga menciptakan kepercayaan dan kredibilitas bagi institusi pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, sekolah yang transparan akan menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas. Budaya sekolah yang transparan adalah langkah penting dalam penerapan pendidikan anti korupsi. Budaya transparan di sekolah mencakup keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas dalam semua aspek operasional dan interaksi di sekolah. Dengan menanamkan budaya ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anti korupsi dan membentuk karakter siswa yang berkomitmen untuk menolak segala bentuk korupsi. Kepala sekolah dan staf sebagai manajemen sekolah harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan integritas. Mereka harus menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari dan keputusan yang diambil. dengan adanya budaya sekolah yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan Siswa dan Orang Tua karena dengan adanya siswa dan orang tua dapat melihat dan memahami bagaimana keputusan diambil dan dana digunakan. selain itu, Kepercayaan Publik juga meningkat karena Sekolah yang

transparan lebih dipercaya oleh masyarakat dan dapat menjadi contoh baik bagi institusi pendidikan lainnya (Ketut et al., 2023).

5. Kolaborasi dengan lembaga anti korupsi

Kolaborasi dengan lembaga anti korupsi merupakan langkah strategis dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah. Melalui program bersama, pelatihan, kampanye, dan proyek komunitas, kolaborasi ini dapat memperkuat upaya sekolah dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran pada siswa. Manfaat dari kolaborasi ini tidak hanya dirasakan oleh siswa dan guru tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang berkomitmen untuk menolak segala bentuk korupsi dan membangun masyarakat yang lebih transparan dan berintegritas. Bekerja sama dengan lembaga anti korupsi untuk mengembangkan modul pembelajaran yang mengintegrasikan materi anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian lembaga anti korupsi untuk mengembangkan program pendidikan yang lebih komprehensif dan efektif. Dengan bekerja sama, sekolah dapat mengakses materi pembelajaran yang selalu diperbarui dan relevan dengan kondisi terkini (Nansi & Sudirman, 2022). Kolaborasi dengan lembaga anti korupsi merupakan langkah strategis dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah. Lembaga anti korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, memiliki sumber daya, keahlian, dan program yang dapat mendukung upaya sekolah dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran pada siswa. Kolaborasi ini dapat memperkuat efektivitas program pendidikan anti korupsi melalui berbagai inisiatif dan kegiatan.

Tantangan Penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah

Penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga resistensi budaya. Namun, dengan strategi yang tepat dan komitmen dari semua pihak, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Melalui peningkatan sumber daya, pelatihan, perubahan budaya, inovasi kurikulum, penciptaan lingkungan sekolah yang mendukung, serta evaluasi dan monitoring yang efektif, pendidikan anti korupsi dapat diimplementasikan secara sukses dan memberikan dampak positif yang signifikan. Banyak sekolah yang masih kekurangan materi dan modul pembelajaran yang khusus membahas anti korupsi. Sumber daya ini penting untuk membantu guru mengajar topik tersebut dengan efektif. Tidak semua guru dan staf memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dan bagaimana mengajarkannya. Pelatihan dan sosialisasi masih diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi mereka. Kesadaran akan pentingnya pendidikan anti korupsi juga masih rendah di kalangan siswa dan orang tua, sehingga dukungan terhadap program ini tidak selalu optimal.

Di banyak tempat, korupsi telah menjadi bagian dari kebudayaan dan dianggap sebagai hal biasa (Purnama, 2020). Hal ini membuat pendidikan anti korupsi menjadi lebih menantang karena siswa dan orang tua mungkin tidak melihat korupsi sebagai masalah serius. Norma sosial yang toleran terhadap korupsi membuat upaya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi di sekolah lebih sulit, karena norma tersebut sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari.

Mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum yang sudah ada bisa menjadi tantangan, terutama jika kurikulum tersebut sudah sangat padat dan tidak memberikan ruang untuk tambahan materi. Metode pengajaran yang kurang interaktif dan tidak relevan dengan

kehidupan sehari-hari siswa dapat membuat materi anti korupsi menjadi kurang menarik dan sulit dipahami. Menurut Ansyari (2022) menyatakan bahwa implementasi pendidikan anti korupsi belum dilakukan di sekolah yang mana guru belum mengintegrasikan perilaku anti korupsi dalam proses pembelajaran. Guru belum mampu menjadi teladan bagi siswa dan guru belum mampu menerapkan strategi pembelajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk mengurangi perilaku korupsi (Siregar & Chastanti, 2022).

Selain itu, menurut Widodo (2019) menyatakan bahwa tidak hanya guru saja yang memiliki kewajiban untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi, tetapi juga kepala sekolah sebagai leader di sekolah dasar memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan antikorupsi. Kurikulum pendidikan antikorupsi ditekankan pada semua pelajaran yakni pelajaran sosial, sains, dan bahasa. Sedangkan untuk memfasilitasi berbagai gaya belajar siswa (visual, auditory, dan kinesthetic), maka guru dapat menggunakan model pembelajaran yang bervariasi sehingga pembelajaran tidak monoton dan siswa tidak cepat bosan.

Pendidikan anti korupsi di sekolah merupakan upaya penting untuk membangun generasi yang memiliki integritas tinggi dan menolak segala bentuk korupsi (Ginanjari & Purnama, 2023). Namun, penerapan pendidikan ini tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai tantangan. Memahami tantangan-tantangan ini penting agar sekolah dapat mengatasi hambatan dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan anti korupsi.

SIMPULAN

Pendidikan anti korupsi merupakan bagian integral dari upaya membangun karakter siswa yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Melalui integrasi konsep pendidikan karakter dalam pendidikan anti korupsi, sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang korupsi dan dampaknya, tetapi juga nilai-nilai moral yang mendasarinya. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan anti korupsi meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan ini, serta resistensi terhadap perubahan budaya yang mendukung korupsi. Selain itu, metode pengajaran yang kurang interaktif dan kurikulum yang padat juga menjadi hambatan dalam efektivitas pendidikan anti korupsi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara sekolah, lembaga anti korupsi, dan komunitas untuk menyediakan sumber daya yang memadai, memberikan pelatihan kepada guru, meningkatkan kesadaran siswa dan orang tua, serta menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung nilai-nilai integritas dan kejujuran. Secara keseluruhan, pendidikan anti korupsi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang mengubah sikap dan perilaku siswa. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan konsep pendidikan karakter secara efektif, pendidikan anti korupsi dapat menjadi instrumen penting dalam membangun generasi penerus yang bermoral dan beretika dalam menghadapi tantangan korupsi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K., & Sakiyati, I. D. (2019). Kantin kejujuran sebagai upaya dalam pembentukan karakter. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 21–32.
- Ginanjari, D., & Purnama, W. W. (2023). Optimizing Legal Strategies: Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities. *Veteran Law Review*, 6(2), 122-132. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477>
- Ketut, N., Fitri, D., & Dewi, Y. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN*, 3(1).
- Komang, I., & Cahyadi, S. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Strategi Dalam

- Pengembangan Budaya Anti Korupsi Pada Generasi Muda Di Indonesia. *Civic Education Journal*, 4(2).
- LAGHUNG, R. (2023). PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 3(1). <https://doi.org/10.51878/cendekia.v3i1.1950>
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27), 227–239.
- Moleong, J. L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. 32–36.
- Nansi, W. S., & Sudirman, A. (2022). Peningkatan Pemahaman dan Partsipasi Pencegahan Korupsi bagi Mahasiswa Manggarai di Kota Makassar. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.54082/jamsi.235>
- Purnama, W. W. (2020). Tantangan dan Peluang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)*, 10(2), 134-141. <https://doi.org/10.30999/mjn.v10i2.2747>
- Purnama, W. W. (2023). Tantangan Perlindungan Dana Nasabah pada Layanan Equity Crowdfunding di Era Industri 4.0: Analisis Peraturan OJK. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 6(2), 174-183.
- Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.890>
- Siregar, A. A., & Chastanti, I. (2022). Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 13–22.
- Suciptaningsih, O. A. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Gunungpati. *Universitas PGRI Semarang*.
- Taja, N., & Aziz, H. (2016). Mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 39–52.